

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada tahun 1912, dr. Sun Yat Sen berhasil menumbangkan Dinasti Qing yang kemudian dilanjutkan dengan usaha Chiang Kai-shek untuk mempersatukan seluruh Cina dibawah bendera Republik Nasional Cina. Namun cita-cita ini baru terwujud pada tahun 1928, dimana Zhang Xue Liang berhasil memukul mundur pasukan Jepang dan kemudian mengibarkan bendera Negara Republik Nasionalis Cina. Atas jasa Zhang Xue Liang tersebut, kemudian Chiang Kai Shek mengangkatnya sebagai panglima daerah militer Timur Laut, Mancuria.

Namun pada tahun 1933, Jepang melakukan agresi untuk menyerang Cina, yang membuat pemerintah Cina terdesak bahkan akhirnya berhasil dikuasai Jepang, selain itu Jepang juga menguasai Mongolia. Kemudian dibawah tekanan agresi Jepang, pada tanggal 1 Agustus 1933, lahirlah partai Komunis dengan Tentara Merahnya dibawah pimpinan Mao Zedong. Pemerintah Nasionalis Chiang Kai Shek merasa terancam dengan hadirnya Partai Komunis ini yang dianggap dapat mengacaukan pemerintah Nasionalis. Namun karena keadaan yang gawat, dimana agresi Jepang semakin meningkat ke Cina, maka Partai Komunis terpaksa bersatu dengan pemerintah Nasionalis membentuk front Persatuan Nasionalis untuk melawan agresi Jepang.¹

¹ WD. Sukisman, *Sejarah China Kontemporer Jilid 1*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hal. 17

Hingga saat ini, persoalan krusial yang dihadapi pemerintahan Cina daratan dan Taiwan adalah perdebatan sengit antara pihak yang mempertahankan satu Cina, dan pihak yang menginginkan kemerdekaan Taiwan. Untuk memperoleh dukungan maupun pengakuan sebagai negara yang berdaulat, Taiwan menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah negara melalui lobi-lobi yang dilakukannya.

Untuk membicarakan tentang hubungan kedua selat, pemerintah Cina daratan dan Taiwan mengadakan sejumlah perundingan informal. Seperti misalnya perundingan informal yang dilakukan pada tahun 1992. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Cina daratan diwakili oleh *Assosiation for Relations Across the Taiwan Strait*, dan Taiwan diwakili oleh *The Taiwan Strait Exchange Foundation*. Kemudian pada tahun 1993, ARATS dan SEF melakukan perundingan kembali, dan dilangsungkan di Singapura. ARATS diwakili oleh Wang Daohan, dan SEF diwakili oleh Koo Chen-fu. ARARS dan SEF melakukan sejumlah negosiasi untuk membicarakan kedua sisi selat Taiwan. Dalam perkembangannya, perundingan kedua yang disepakati berlangsung pada 1995, tidak pernah dilaksanakan, karena Taiwan melakukan tindakan yang memancing kemarahan pemerintah Cina daratan. Akibatnya, perundingan diantara keduanya untuk sementara dihentikan. Tetapi pemerintah Cina daratan tetap menerapkan kebijakan reunifikasi damai.

Belum tercapainya kesepakatan tentang reunifikasi damai antara kedua sisi selat Taiwan, membuat status quo yang diberlakukan pemerintah Cina daratan terhadap Taiwan tidak berubah. Namun penerapan status quo ini teruik

pada kepemimpinan presiden RRC, Jiang Zemin, dan Presiden Taiwan Lee Teng-hui. Pada 9 juli 1999, Lee Teng-hui mengeluarkan pernyataan tentang “teori dua negara”. Menurut Lee, Taiwan berkeinginan untuk beroperasi atas dasar “negara dengan negara” dengan RRC, dan menurut pemerintah Cina daratan untuk memperlakukan Taiwan sederajat seperti layaknya sebuah negara. Bagi pemerintah Cina daratan, pernyataan Lee Teng-hui tersebut bertentangan dengan prinsip *One China Policy*. Sejak Lee menyatakan tentang teori dua negara, hubungan resmi antara lembaga semi pemerintah di kedua sisi selat Taiwan dibekukan oleh pemerintah Cina daratan. Menjelang diadakan pemilu tahun 2000 di Taiwan, pemerintah Cina daratan kembali melancarkan ancaman militer.

Hubungan antara kedua pihak mengarah ke sinyal positif ketika Chen Shui-bian, Presiden Taiwan yang terpilih pada Maret 2000 mendeklartasikan 4 tidak plus satu dalam pidato pelantikannya, yaitu :

1. Tidak memproklamasikan kemerdekaannya
2. Tidak mengubah status negara
3. Tidak mengubah konstitusi
4. tidak mendorong referendum mengenai status quo Taiwan
5. Tidak menghapuskan pedoman-pedoman penyatuan⁴

Bahkan Perdana menteri Taiwan frank Hsieh menyerukan perundingan langsung dengan Cina, dan langkah itu lebih disukai ketimbang perang diplomatik untuk memperebutkan pengakuan dunia. Dan pemerintah Chen Shui-bian, bersedia memenuhi pra-syarat oleh Cina untuk mengadakan pembicaraan yang

⁴ www.suaramerdeka.com/berita/0201/02010711

mengharuskan Taiwan tidak menyatakan kemerdekaannya. Menurut Hsieh, Chen Shui-bian berjanji tidak akan mengambil langkah untuk membentuk “Republik Taiwan” menjelang masa jabatannya berakhir tahun 2008.

Pada tahun kedua kepemimpinannya, Chen menggulirkan isu tentang referendum yang berdampak serius terhadap hubungannya dengan Cina. Di bawah Chen Shui-bian, Taiwan membuat sejumlah terobosan dalam hubungannya dengan pemerintah Cina daratan. Pada 3 Agustus 2002, Chen melalui *teleconference* kepada *The World Federation of Taiwanese Association* di Tokyo yang prokemerdekaan, Chen mengeluarkan pernyataan tentang *each side (of the Taiwan Strait) is a country* dan mendukung dilakukannya referendum untuk mendukung masa depan Taiwan

Gagasan Chen Tentang referendum bertujuan untuk menentukan masa depan Taiwan. Diharapkan melalui referendum, sebanyak 23 penduduk Taiwan akan menentukan apakah berdiri sebagai Negara berdaulat atau harus bergabung dengan Cina.

Pada 27 November 2003, Parlemen Taiwan membuat sejarah dengan mengesahkan rancangan Undang-Undang Referendum menjadi Undang-Undang Referendum. Pengesahan UU tersebut bagi pemerintah Cina daratan merupakan langkah berbahaya yang diambil pemerintah Taiwan karena mengarah pada kemerdekaan. Dengan adanya pengesahan UU tersebut, pemerintah Cina daratan kembali menggunakan ancaman untuk mewujudkan reunifikasi, yaitu hari Senin tanggal 14 maret 2005 , Dewan Nasional Rakyat Cina mengesahkan UU anti separatis Taiwan dari kedaulatan Cina. UU Antinemisahan itu disetujui oleh

hampir aklamasi, dengan 2.896 suara setuju, nol suara menentang dan dua abstain. Seperti dilansir Kantor Berita Xinhui, UU tersebut telah disetujui oleh Presiden Cina, Hu Jintao⁵. Dalam Undang-undang itu disebutkan pemerintah Beijing berhak melancarkan tindakan kekerasan untuk menghambat niat Taiwan memisahkan diri dari Cina. “Bukan hanya provokasi serius ini tidak membantu bagi Taiwan”, Wu berpendapat, Undang-undang itu akan membatasi kebebasan dan demokrasi Taiwan. Beberapa pengamat melihat, tekanan-tekanan Cina atas upaya-upaya non-perdamain, tampak sengaja dirancang untuk memasukkan alternatif penggunaan kekuatan militer, termasuk blokade atau sanksi ekonomi terhadap Taiwan yang oleh Cina masih dianggap sebagai propinsi yang membangkang. Kata juru bicara Taiwan Cho Jung Tai.

Undang-Undang tersebut serupa dengan kewenangan untuk berperang dan telah membangkitkan kebencian di Taiwan dan penentangan di komunitas Internasional. Begitu Undang-undang itu lahir, Presiden Chen Shui-bian mendesak sejuta warga untuk menggalang aksi unjuk rasa di ibukota Taipei hari Sabtu saat kemarahan memuncak sehubungan dengan Undang-Undang Antipemisahan Beijing yang ditujukan terhadap pulau tersebut⁶

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diangkat pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana prospek Hubungan Cina-Taiwan pasca diadopsi UU

C. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Dalam studi Ilmu sosial, teori menjadi sebuah alat analisis utama dalam melihat suatu permasalahan sehingga dalam menjelaskan permasalahan tentang penulisan ilmiah ini penulis menggunakan kerangka dasar teori sebagai acuan, yaitu :

Teori system

Dalam teori system ini dijelaskan mengenai sistem yang merupakan saling keterkaitan antara sisi-sisinya, bila ada perubahan disatu sisi atau bagian dari sisi itu, maka bagian yang lainpun akan mengikuti dan berpengaruh. Dengan kata lain apabila sistem tersebut mengalami perubahan maka bagian-bagiannya pun akan mengalami perubahan. Teori sistem yang disampaikan oleh James E. Dougherty di mana isinya adalah *system theory or general system theory, as a series of statement about relationships among independent and dependent variable in which changes in one or more variable are accompanied, or followed, by changes in other variable or combinations of variables.*⁷

Melihat pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa teori sistem atau teori umum tentang sistem adalah hubungan timbal balik antara negara dan komponen-komponen yang termasuk diantaranya adalah variable independent dan variable dependent yang dimana ikut merubah atau menambah variable lain yang menyertainya dengan cara merubah variable itu sendiri atau mengkombinasikannya.

⁷ James E. Dougherty & R.L Pfatzgraff jr. "Contending The Theories" 55

Begitu pula halnya dengan John Lovell, menurutnya suatu sistem memiliki unsur-unsur utama yaitu sebagai berikut⁸ :

- a. Serangkaian bagian-bagian yang secara bersama-sama mampu melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

Begitu juga sekumpulan unit-unit yang membentuk sistem ekonomi yang bertujuan untuk mendatangkan kemajuan dan kesejahteraan bagi negara. Keputusan-keputusan yang menyangkut pencapaian tujuan-tujuan ekonomi negara baik di lingkungan eksternal maupun internal, sarana dan sumber daya yang digunakan untuk mengejar tujuan itu, dan yang memuat tanggapan bagi kemajuan sistem ekonomi dari lingkungan eksternal dan internal.

- b. Hubungan fungsional antar bagian.

Dalam suatu sistem, setiap bagian menjalankan fungsi yang mempengaruhi efektifitas kerja suatu sistem. Karena itu setiap bagian memiliki peran yang sangat penting. Tidak berfungsinya suatu bagian memang tidak akan membuat sistem itu hancur tapi akan membuat daya kerjanya terganggu atau macet.

- c. Hubungan antara sistem dengan lingkungannya.

Sistem ekonomi berhubungan terus menerus dengan lingkungannya yaitu antara lain dengan stabilitas keamanan negara, keadaan atau perkembangan politik dalam dan luar negeri dan kondisi kesejahteraan negara. Hal ini adalah sebuah upaya dari sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau mengendalikannya. Dalam hal ini sistem selalu memantau lingkungannya,

⁸ Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat analisis dan Teorisasi*, PAU-SS UGM. Yogyakarta, 1989, hal 117-118

memberi tanggapan terhadap lingkungan itu dan berusaha untuk mempengaruhinya.

Cara yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan antara sistem dengan lingkungannya adalah sebagai hubungan timbal balik yang dinamis, yaitu lingkungan mempengaruhi sistem, sistem mempengaruhi lingkungan, dan lingkungan yang terpengaruh itu akan mempengaruhi sistem kembali.

Sehingga pada umumnya sistem mempunyai ciri-ciri yaitu :

- Bertujuan
- Mempunyai batas
- Tersusun dari sub system
- Tercapai saling keterkaitan dan saling tergantung
- Merupakan satu kebulatan yang utuh
- Melakukan kegiatan transformasi
- Tercapai mekanisme control
- Memiliki kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri sendiri.

Dalam kasus reunifikasi ini kalau ditelaah ada hubungan saling mempengaruhi antar sub sistem atau unit pada sebuah sistem, dengan kata lain jika sistem mengalami perubahan maka bagian-bagiannya pun akan mengalami perubahan, dapat dilihat Cina yang merupakan sebuah sistem, pemerintahan yang dikuasai oleh Partai Komunis Cina (PKC) yang secara sah memiliki klaim atas seluruh wilayah bagian Cina yang berada dibawah kekuasaan sebelumnya dengan

menyatakan bahwa hanya ada satu Cina, dan baik Cina daratan maupun Taiwan adalah bagian dari Cina yang menunggu proses reunifikasi.

Untuk mewujudkan reunifikasi secara damai maka pemerintah Cina melakukan perubahan dengan mengesahkan Undang-undang Antipemisahan yang ditujukan bagi Taiwan untuk dibimbing kembali ke dalam pengakuan kedaulatan Cina, dan untuk mewujudkan penyatuan kembali kedua belah pihak dengan damai, sehingga Taiwan sebagai sub sistem dalam sebuah sistem pun mengalami perubahan dengan melakukan protes besar-besaran terhadap Cina atas pengesahan Undang-undang yang dianggap Taiwan itu sangat merugikan, yang semakin menimbulkan ketegangan dan memperburuk hubungan antar kedua selat, namun pada kenyataannya Undang-undang Antipemisahan membawa dampak yang positif terhadap hubungan kedua selat, dengan ditunjukkan kunjungan yang dilakukan oleh oposisi Lien Chan yang sangat mendukung reunifikasi perdamaian antara Cina dan Taiwan, melakukan dialog dengan Presiden Hu-Jintao, yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan terutama tetap berjalannya hubungan kerjasama ekonomi dalam perdagangan, dengan dukungan yang diberikan oleh para pengusaha-pengusaha Taiwan untuk mewujudkan reunifikasi

Melihat teori sistem yang di ungkapkan oleh James E. Dougherty, bahwa ada hubungan timbal balik antara Negara dan komponen-komponen, dimana antara Cina dan Taiwan memiliki saling ketergantungan dan saling keterkaitan terutama dalam bidang ekonomi. Untuk melengkapi teori diatas, maka penulis

B. Teori Interdependensi

Menurut Robert Keohane, bahwa teori saling tergantung adalah saling ketergantungan timbul kalau perubahan di satu bangsa menimbulkan perubahan penting di satu/lebih Negara lain, atau di mana akibat dari tindakan satu pemerintah sebagian ditentukan oleh apa yang dilakukan pemerintah-pemerintah lain. Implikasi paling penting dari ini adalah bahwa interdependensi itu bisa timbul di antara kawan maupun di antara lawan, dan para teoritis yang menganut perspektif Kantian menegaskan bahwa pada kenyataannya bangsa-bangsa di dunia ini semakin saling tergantung, tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada diri mereka sendiri, dan semakin tidak mampu menghalangi penetrasi dari luar yang berujud gagasan, kekuatan ekonomi, tekanan cultural, atau bahkan intervensi militer.

Akibat Interdependensi pemerintah-pemerintah nasional mendapati bahwa semakin banyak urusan domestic mereka dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan eksternal dan mereka membuat keputusan sesuai dengan kenyataan. Beberapa ilmuwan melihat bahwa kenyataan ini akan memaksa para pemerintah itu untuk lebih banyak melakukan perundingan dan kompromi, sehingga bisa mendorong timbulnya dunia yang lebih damai.⁹

Maka dengan melihat pemikiran yang terdapat di atas, bisa dilihat dari perubahan yang dilakukan oleh Cina, Cina yang selama ini menutup diri terhadap dunia luar, sehingga terkenal dengan sebutan negara Tirai Bambu, akhirnya Cina melakukan revolusi politik pintu terbuka dengan menarik penanaman modal

asing dengan menciptakan Zone Ekonomi Khusus, yaitu di propinsi Gung Dong (kabupaten Shen Zhen, Zhui Hai, dan Shen Tau) dan di propinsi Fu Jian (pulau Xia Men). Para penanam modal asing di Zone Ekonomi Khusus tersebut mendapat berbagai keringanan pajak, di samping itu telah tersedia berbagai prasarana-prasarana, seperti jalan raya, tenaga listrik dan pelabuhan.

Pertumbuhan Cina sebagai superpower industri ini telah mengakibatkan pergeseran besar dalam tata ekonomi global, dan sekarang Cina memperluas jaringan ekonominya dengan masuk menjadi anggota WTO, yang semakin memperkuat ekonominya di dunia internasional.

Keberhasilan Cina tidak akan bisa dicapai tanpa modal asing, dan investor terbesar Cina salah satunya adalah Taiwan. Investasi Taiwan yang terdaftar di Cina daratan mencapai 1,09 miliar dollar AS, nilai perdagangan mencapai US\$ 61,7 miliar, dengan perekonomian Taiwan yang berkembang cepat, dengan GNP lebih dari 10 %, Taiwan merupakan aset ekonomi yang sangat menjanjikan karena mampu meningkatkan kapabilitas perekonomian RRC.

Apalagi dengan adanya investasi yang dilakukan oleh Taiwan ke RRC dan terbukanya peluang kerja yang menjanjikan bagi pekerja RRC di berbagai unit-unit industri di Taiwan. Kelebihan dan kemampuan Taiwan di bidang teknologi industri bisa memberi kesempatan yang luas bagi RRC untuk dapat menyerap teknologi-teknologi yang tinggi yang ada di Taiwan.

Perekonomian yang selama ini dikenal sangat kuat di seluruh dunia dimana pengusaha keturunan RRC mempunyai jaringan bisnis yang sangat rapi

menguntungkan perekonomian Taiwan untuk semakin memperluas pasarnya keseluruh dunia melalui jaringan bisnis yang dimiliki RRC, dan kepentingan nasional Taiwan akan terpenuhi yaitu untuk bisa berperan di Forum Internasional.

D. HIPOTESA

Berdasarkan teori dan konsep di atas dapat ditarik suatu hipotesa bahwa prospek terjalannya hubungan Cina dan Taiwan pasca pengesahan UU Antipemisahan akan membaik karena:

- a. dukungan Partai Oposisi Nasional Taiwan terhadap *One China Policy*
- b. ada hubungan saling ketergantungan ekonomi antara Beijing dan Taipei.

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut yakni:

1. Memberikan gambaran yang obyektif mengenai hubungan Cina-Taiwan pasca disahkan UU Antipemisahan.
2. Menerapkan Teori yang telah penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Kegiatan penulisan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi Tugas Akhir

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Supaya data yang terkumpul tetap relevan maka diperlukan batasan penelitian sejak 2000-2005, yaitu 2005 disahkan UU Antipemisahan, Namun demikian, penelitian ini juga akan mengambil data-data di luar waktu yang telah ditentukan di atas, selama data-data tersebut masih relevan dan mendukung kelengkapan penelitian ini.

G. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah ini dilakukan dengan metode produktif dan berdasarkan kerangka pemikiran yang kemudian ditarik hipotesa yang akan dibuktikan dengan data empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka, oleh karena itu data yang diperoleh adalah data sekunder yang bersumber pada literature, Koran-koran, buletin-buletin, makalah-makalah ilmiah, majalah-majalah dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan mengenai hubungan Cina dan Taiwan

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Umum

Bab ini akan membahas tentang sejarah munculnya dua Cina (RRC dan Taiwan) yaitu revolusi Cina 1949, pada masa pemerintahan Republik Rakyat Cina (Chiang Kai-Shek) dan pada masa pemerintahan Republik Rakyat Cina (Mau Zedong) serta dinamika politik Cina-Taiwan masa Jiang Zemin dan Lee Teng-hui

BAB III : Penjelasan

Bab ini membahas pengesahan Undang-undang Antipemisahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

BAB IV : Pembahasan

Bab ini akan membahas mengenai dukungan Partai Oposisi Taiwan terhadap *One China Policy* dan saling ketergantungan antara Cina dan Taiwan dalam bidang ekonomi

BAB V : Kesimpulan